

Kajian Tingkat Pencapaian Penerapan Smart Government Menurut OPD dan Masyarakat di Kabupaten Sumedang

Fawwaz Muhammad Fadhilla^{*}, Irland Fardani

Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

fawwazfadhila@gmail.com, irland.fardani@unisba.ac.id

Abstract. The Smart Government concept in Sumedang Regency has derivatives, including government administration, bureaucracy, and public services. The implementation of Smart Government in Sumedang Regency still has several weaknesses including public awareness of existing services, besides the need for improvement in optimizing digital services. So this research is to get the value of the achievement level of Smart Government implementation in Sumedang Regency. For this research method, namely qualitative, with observation and questionnaires. It can be seen that Smart Government Sumedang Regency has a final score of 61% - 80%, which means that the score is included in the Integrated category. where according to OPD there is still a lack in terms of sensors in Sumedang Regency, besides that according to the community, technological support in Sumedang Regency in implementing Smart Government is still lacking. Therefore, it is necessary to make adjustments to the needs of the community in providing services in order to facilitate the community in Sumedang Regency, then there is more maintenance in infrastructure to support services and socialization and training for the community and ASN in Smart Government in order to maximize services.

Keywords: *Achievement Level, Smart Government, Garuda Smart City Framework.*

Abstrak. Konsep Smart Government di Kabupaten Sumedang memiliki turunan, diantaranya penyelenggaraan pemerintahan, birokrasi, dan pelayanan publik. Penerapan Smart Government di Kabupaten Sumedang masih terdapat beberapa kelemahan diantaranya mengenai kesadaran masyarakat terhadap layanan - layanan yang ada, selain itu perlunya peningkatan dalam mengoptimalkan layanan digital. Maka penelitian ini untuk mendapatkan nilai tingkat pencapaian penerapan Smart Government di Kabupaten Sumedang menggunakan metode Garuda Smart City Framework. Untuk metode penelitian ini yaitu mix method, dengan observasi dan kuesioner. Dapat diketahui Smart Government Kabupaten Sumedang memiliki skor akhir 61% - 80% yang artinya skor tersebut masuk kedalam kategori Integrated. dimana menurut OPD masih kekurangan dalam segi sensor yang terdapat di Kabupaten Sumedang, selain itu menurut masyarakat dukungan teknologi pada Kabupaten Sumedang dalam menerapkan Smart Government masih kurang. Maka dari itu perlu adanya penyesuaian mengenai kebutuhan masyarakat dalam penyediaan layanan agar dapat memudahkan masyarakat di Kabupaten Sumedang, lalu adanya pemeliharaan lebih dalam infrastruktur untuk penunjang pelayanan dan adanya sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat dan ASN dalam Smart Government agar dapat memaksimalkan pelayanan.

Kata Kunci: *Tingkat Pencapaian, Smart Government, Garuda Smart City Framework, Masyarakat dan OPD.*

A. Pendahuluan

Seiring berjalannya waktu dan pertumbuhan penduduk yang relatif pesat, berbagai kesenjangan dan permasalahan sosial bermunculan di kota, dan pemerintah perlu mencari solusi untuk meminimalisirnya. Bagi pemerintah pusat dan daerah, keberadaan teknologi merupakan suatu keajaiban (Cibro, 2021). Berdasarkan hal tersebut Kabupaten Sumedang merencanakan untuk menerapkan konsep *smart city* yang tertuang dalam buku masterplan Kabupaten Sumedang, untuk mengurangi permasalahan permasalahan yang terdapat di kabupaten Sumedang. Dalam hal ini konsep *smart city* diterapkan pada implementasi sistem pemerintahan yang ada. Mirip dengan proyek dan sistem yang bertujuan untuk mendorong pengembangan administrasi kota, hal ini dapat dilaksanakan dengan persetujuan pemerintah. *Smart city* adalah proyek yang menggabungkan kemajuan terobosan dalam penggunaan analisis data besar dengan masukan masyarakat untuk fokus pada upaya pemerintah daerah dalam memanfaatkan teknologi baru guna membentuk kembali hubungan antara pemerintah dan warga (Bloom & Reenen, 2013) dalam (I Setiawan & Dkk, 2022). *Smart City* terbagi menjadi 6 dimensi yaitu *smart economy*, *smart environment*, *smart people*, *smart living*, *smart government* (Cohen. 2013) dalam (Santoso & Rahmadanita, 2020).

Smart Government memanfaatkan kekuatan "data" dalam meningkatkan pelayanan publik, untuk terlibat dengan warga negara dan untuk pengembangan kebijakan serta menerapkan solusi untuk kesejahteraan Masyarakat (Harsh dan Ichalkaranje). *Smart Government* juga sebagai pemerintah kota pintar, dimana pemerintah daerah menerapkan kebijakan untuk pengembangan daerah yang cerdas dengan pemangku kepentingan (Scholl & Scholl, 2014) dalam (Santoso & Rahmadanita, 2020), dengan kata lain *Smart government* merupakan sumber layanan publik yang cerdas dan terintegrasi, yang melibatkan administrasi kota dan keterlibatan publik. *Smart Government* sebagai media untuk mencapai *good governance* menjadi penting di perkotaan yaitu pada institusi dan lembaga pemerintahan yang dikembangkan berdasarkan kemampuan teknologi informasi sehingga memungkinkan pemangku kepentingan mengakses teknologi informasi secara efektif dan efisien. Hal ini merupakan salah satu elemen terpenting. Serta fungsi dasar pemerintah untuk mengelola informasi data seluruh aspek yang berkaitan dengan perkotaan seperti masyarakat, infrastruktur, jaringan, sumber daya, kebijakan, ekonomi, lingkungan, dan lain-lain terkait dengan konsep *Smart Government*, semua data di atas Informasi tersebut diubah ke dalam format digital dan dapat disimpan dalam suatu "database" yang dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan kapanpun dan dimanapun melalui jaringan online (Wahyuni dkk., 2021).

Kabupaten Sumedang menghadapi berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik yang memadai bagi masyarakat. Pada penerapan konsep *Smart Government* di Kabupaten Sumedang memiliki beberapa turunan, antara lain penyelenggaraan pemerintahan, birokrasi, dan pelayanan publik. Pada buku 2 masterplan smart city disebutkan belum optimalnya pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh ASN di Kabupaten Sumedang, hal ini juga berhubungan dengan misi keempat yang terdapat pada RPJMD di Kabupaten Sumedang yaitu menanta birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab dalam pelayanan masyarakat, dalam dokumen tersebut disebutkan juga ada beberapa program/kegiatan yang sudah berjalan (Abimanyu dkk., 2023).

Kondisi pelayanan publik di Kabupaten Sumedang, pelayanan nya sudah baik dan layanan publik sudah tidak berbayar, namun infrastruktur penunjang dalam pelaksanaan masih kurang, selain itu kurang informasi dan sosialisasi tentang layanan publik kepada masyarakat, sumber daya manusia yang terdapat di Kabupaten Sumedang masih kurang dalam penguasaan teknologi. Untuk kondisi birokrasi di Kabupaten Sumedang masih terdapat beberapa kekurangan dimana sistem yang tidak terintegrasi antar instansi nya, yang terakhir kondisi kebijakan di Kabupaten Sumedang, masih terdapat beberapa kebijakan yang saling bertabrakan antar instansi nya, dan diperlukan pembuatan kebijakan mengenai layanan publik (Pemkab Sumedang & UPM, 2019).

Belum optimalnya pelayanan masyarakat yang ada di Kabupaten Sumedang, meskipun sudah berjalan beberapa program strategis *Smart Government* selama dua tahun, Kabupaten Sumedang masih belum optimal dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat (Abimanyu dkk., 2023). Kemudian selama tahun 2013-2017 skor Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Sumedang dibawah 50 atau nilai C yang masuk dalam kategori kurang, sehingga perlu banyak perbaikan atau perubahan yang mendasar (Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 - 2023,

2019). Terdapat di beberapa desa masih belum terintegrasinya layanan publik secara menyeluruh, sehingga masyarakat masih melakukan beberapa layanan yang berbeda setiap instansi dan dilakukan dengan cara terpisah (Ami dkk., 2021) dalam (Prathama & Sagita, 2022), terdapat perbedaan antara desa yang sudah terintegrasi dan yang belum yakni, dalam penerapan E – Office dimana dalam aplikasi tersebut sudah terintegrasi dalam beberapa layanan dan informasi, dapat juga memudahkan dalam proses menerima surat, mengirim surat, men disposisi surat, dan mengarsipkan surat, yang dapat dilakukan dimana saja secara online, Namun ada beberapa desa yang belum ataupun kesulitan dalam penggunaan aplikasi tersebut (Ginanjari dkk., 2024).

Penerapan *smart government* di Kabupaten Sumedang masih terdapat beberapa kelemahan diantaranya mengenai kesadaran masyarakat terhadap layanan yang ada, selain itu perlunya peningkatan dalam mengoptimalkan layanan digital (Barsei dkk., 2023). *Smart government* di Kabupaten Sumedang masih memerlukan penguatan literasi digital warga, interoperabilitas data dan konsistensi kepemimpinan yang kuat dalam implementasi transformasi digital (Nasional, 2022). Dengan belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat meskipun sudah ada beberapa program *smart government* yang sudah di terapkan, hal ini perlu adanya pengukuran tingkat pencapaian terhadap penerapan *smart government* di Kabupaten Sumedang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan nilai tingkat pencapaian *Smart Government* di Kabupaten Sumedang berdasarkan dari pandangan OPD dan masyarakat Kabupaten Sumedang. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan berharga bagi Kabupaten Sumedang untuk merancang strategi yang lebih efektif dalam melanjutkan dan mengembangkan konsep *Smart Government*. Dengan demikian, penelitian ini memiliki potensi untuk menciptakan pemerintahan yang lebih cerdas, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sumedang.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode *mix methods*, yang merupakan suatu pendekatan penelitian yang menggabungkan dua bentuk pendekatan, yaitu kuantitatif dan kualitatif ke dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga data yang diperoleh akan lebih komprehensif, valid, reliabel dan objektif (Nia & Loisa, 2019). pengambilan metode ini yaitu untuk mengembangkan instrument yang lebih baik dalam mengevaluasi penerapan *Smart Government*. *Mix Method* pada penelitian ini dibutuhkan untuk, metode kualitatif yaitu wawancara digunakan untuk validasi data hasil dari kuisisioner, sehingga penelitian ini menggunakan *Mix Method*. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan kuisisioner, wawancara, dan observasi lapangan. Kuisisioner ditujukan kepada 4 dinas terkait yang berkaitan dengan pengambilan variabel dan juga memahami jalannya *Smart Government*, yang diantaranya adalah Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Wawancara pada penelitian ini digunakan untuk menguji validitas data, dengan cara menanyakan kembali hasil daripada kuisisioner. Pengambilan sampel dalam wawancara menggunakan teknik *accidental sampling*. *accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja pasien yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (*Accident*). Sedangkan observasi lapangan dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui kondisi yang terjadi berdasarkan pada hasil kuisisioner dan wawancara.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Skoring OPD

Tabel 1. Evaluasi terhadap Empat Variabel Utama

No	Variabel	Indikator	Diskominfosanditik	Bappppeda	Bkpsdm	PUPR	Hasil Skala Likert	Keterangan
1		Layanan Publik Online	5	4	4	4	4,25	61%-80 (Integrated)
2		Layanan Terintegrasi	4	4	4	4	4	61%-80 (Integrated)
3	Online Service	Pembayaran Elektronik	4	4	4	4	4	61%-80 (Integrated)
4		Pengembangan aplikasi yang akan dilakukan	4	4	4	4	4	61%-80 (Integrated)
5		Kemudahan proses	4	4	4	4	4	61%-80 (Integrated)
6		Cakupan Wifi	3	4	3	4	3,5	61%-80 (Integrated)
7	Infrastructure	Cakupan Sensor	2	4	3	2	2,8	41%-60% (Scattered)
8		Penggunaan internet di OPD	5	4	4	4	4,3	61%-80 (Integrated)
9		Dukungan teknologi	2	4	3	3	3	41%-60% (Scattered)
10		Open Data	4	4	4	4	4	61%-80 (Integrated)
11		Pusat data	5	4	4	5	4,5	81%-100 (Smart)
12	Open Government	Keberadaan data center	5	4	4	4	4,25	61%-80 (Integrated)
13		Layanan teknologi informasi	5	4	5	5	4,75	81%-100 (Smart)
14		Kejelasan informasi tentang proses	4	4	4	4	4	61%-80 (Integrated)
15		Standar OPD	4	4	4	4	4	61%-80 (Integrated)
16	Sumber Daya Manusia	Standar Pendidikan	3	4	4	4	3,75	61%-80 (Integrated)
17		Standar pengguna	4	4	3	3	3,5	61%-80 (Integrated)
18		Sosialisasi pengguna	4	4	4	4	4	61%-80 (Integrated)

No	Variabel	Indikator	Diskominfosanditik	Bappeda	Bkpsdm	PUPR	Hasil Skala Likert	Keterangan
19		Pelatihan OPD	4	4	4	4	4	61%-80 (Integrated)
						Skor Akhir	3,9	61%-80 (Integrated)

Sumber: Data Penelitian yang Sudah Diolah, 2024.

Tabel di atas menunjukkan hasil evaluasi terhadap empat variabel utama, yaitu Online Service, Infrastructure, Open Government, dan Sumber Daya Manusia, yang dinilai berdasarkan sejumlah indikator menggunakan skala Likert. Penilaian dilakukan oleh empat instansi, yaitu Diskominfosanditik, Bappeda, BKPSDM, dan PUPR. Hasil akhirnya dirata-rata untuk menghasilkan nilai akhir pada kolom Hasil Skala Likert.

Variabel *Online Service* mencakup lima indikator, yang semuanya menunjukkan tingkat maturity berada pada rentang 61%-80%, atau dikenal dengan kategori Integrated. Hal ini menggambarkan bahwa setiap aspek yang diukur telah mencapai tahap penerapan yang cukup baik, dengan memastikan bahwa layanan-layanan yang ada telah dirancang untuk saling terhubung dan beroperasi secara terpadu. Kelima indikator tersebut mencerminkan bahwa inisiatif Smart Government telah dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif, tidak hanya terbatas pada implementasi teknis, tetapi juga dengan mempertimbangkan elemen-elemen penting seperti kolaborasi antarinstansi dan integrasi data. Penerapan ini menandakan bahwa setiap layanan yang diberikan sudah terstruktur dengan baik untuk mendukung terciptanya ekosistem digital yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Variabel *Infrastructure* memiliki rata-rata skor 3,4, yang menunjukkan bahwa variabel ini berada pada tingkat maturity dalam kategori Scattered, dengan persentase 41%-60%. Kategori ini mencerminkan bahwa penerapan infrastruktur pendukung masih belum merata dan terdapat ketimpangan pada beberapa aspek yang dinilai. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkat kematangan di antara indikator-indikator yang membentuk variabel tersebut.

Variabel *Open Government* terdiri dari lima indikator utama, yaitu Open Data, Pusat Data, Keberadaan Data Center, Layanan Teknologi Informasi, dan Kejelasan Informasi tentang Proses. Seluruh indikator ini menunjukkan tingkat maturity dalam rentang 61%-80%, yang dikategorikan sebagai Integrated. Tingkat Integrated mencerminkan bahwa penerapan prinsip-prinsip Open Government telah berjalan dengan baik, dengan fokus pada transparansi, kolaborasi, dan efisiensi dalam pengelolaan data serta layanan yang disediakan. Dengan seluruh indikator berada pada tingkat Integrated, variabel Open Government menunjukkan bahwa inisiatif untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka telah dilaksanakan secara menyeluruh. Integrasi data, koordinasi antarinstansi, dan penyediaan layanan teknologi yang transparan menjadi landasan penting dalam mendukung pelaksanaan inisiatif ini.

Selanjutnya, indikator Sosialisasi Pengguna menunjukkan bahwa pemerintah telah aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat atau pihak terkait mengenai penggunaan layanan berbasis teknologi, sehingga mereka dapat memahami dan memanfaatkan layanan secara maksimal. Indikator terakhir, yaitu Pelatihan OPD, menggambarkan bahwa pemerintah telah memberikan pelatihan yang memadai kepada pegawai OPD, dengan tujuan meningkatkan kompetensi dan kesiapan mereka dalam menjalankan tugas-tugas yang berbasis teknologi.

Analisis Skoring Terhadap Masyarakat**Tabel 2.** Analisis Skoring terhadap Masyarakat

No	Variabel	Indikator	Skala Likert					Rata Rata	Keterangan
			1	2	3	4	5		
1		Layanan Publik Online	0	1	1 4	2 7	1	3,7	61%-80 (Integrated)
2		Layanan Terintegrasi	0	0	1 0	3 2	1	3,8	61%-80 (Integrated)
3	Online Service	Pembayaran Elektronik	0	1	1 8	2 3	1	3,6	61%-80 (Integrated)
4		Pengembangan aplikasi yang akan dilakukan	0	2	1 4	2 6	1	3,6	61%-80 (Integrated)
5		Kemudahan proses	0	0	1 1	2 8	4	3,8	61%-80 (Integrated)
6		Cakupan Wifi	0	1	1 6	2 5	1	3,6	61%-80 (Integrated)
7	Infrastructure	Cakupan Sensor	0	6	1 2	2 5	0	3,4	41%-60% (Scattered)
8		Penggunaan internet di OPD	0	3	8 1	3 1	1	3,7	61%-80 (Integrated)
9		Dukungan teknologi	0	1	9 3	3 3	0	3,7	61%-80 (Integrated)
10		Open Data	0	0	1 1	3 1	1	3,8	61%-80 (Integrated)
11		Pusat data	0	0	1 4	2 6	3	3,7	61%-80 (Integrated)
12	Open Government	Keberadaan data center	0	1	9 9	2 9	4	3,8	61%-80 (Integrated)
13		Layanan teknologi informasi	0	0	1 3	2 8	2	3,7	61%-80 (Integrated)
14		Kejelasan informasi tentang proses	0	0	6 7	3 7	0	3,9	61%-80 (Integrated)
15	Sumber Daya Manusia	Standar OPD	0	1	1 1	3 1	0	3,7	61%-80 (Integrated)

16	Standar Pendidikan	0	1	1 1	3 1	0	3,7	61%-80 (Integrated)
17	Standar pengguna	0	1	1 0	3 3	0	3,8	61%-80 (Integrated)
18	Sosialisasi pengguna	0	1	1 1	3 1	0	3,7	61%-80 (Integrated)
19	Pelatihan OPD	0	2	8 3	3 3	0	3,7	61%-80 (Integrated)
	Skor Akhir						3,7	61%-80 (Integrated)

Sumber: Data Penelitian yang Sudah Diolah, 2024.

Tabel ini menunjukkan bahwa berbagai aspek dalam layanan publik berbasis teknologi telah mencapai tingkat integrasi yang cukup baik. Berdasarkan skala Likert yang digunakan dalam penelitian ini, sebagian besar indikator memiliki rata-rata antara 3,7 hingga 3,8, yang menandakan bahwa responden cenderung setuju terhadap keberadaan dan pemanfaatan teknologi dalam sistem layanan yang diterapkan. Tabel ini menyajikan hasil evaluasi terhadap tingkat pencapaian Smart Government di Kabupaten Sumedang berdasarkan empat variabel utama, yaitu *Online Service*, *Infrastructure*, *Open Government*, dan Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan hasil analisis, kelima indikator dalam kategori Online Service memperoleh skor rata-rata 3,7 hingga 3,8, yang menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan teknologi dalam layanan publik telah berada dalam rentang terintegrasi (61%-80%). Skor ini mencerminkan bahwa sistem layanan berbasis elektronik telah diterapkan dengan baik dan mulai dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat maupun aparatur pemerintahan dalam berbagai aspek pelayanan.

Pada variabel Infrastruktur, terdapat beberapa indikator utama yang diukur, antara lain cakupan WiFi, cakupan sensor, penggunaan internet di OPD, serta dukungan teknologi. Berdasarkan hasil penelitian, indikator cakupan WiFi menunjukkan tingkat integrasi yang lebih rendah dibandingkan indikator lainnya, dengan skor rata-rata 3,6, yang masuk dalam kategori scattered (41% - 60%). Skor ini mencerminkan bahwa ketersediaan jaringan WiFi di berbagai titik layanan publik maupun instansi pemerintah masih belum merata dan belum mencapai tingkat optimal dalam mendukung layanan digital yang lebih efisien.

Sementara itu, indikator lainnya, seperti cakupan sensor, penggunaan internet di OPD, dan dukungan teknologi, telah mencapai skor rata-rata yang lebih tinggi, yaitu 3,7 hingga 3,8, yang masuk dalam kategori terintegrasi (61%-80%). Hal ini menunjukkan bahwa secara umum, infrastruktur teknologi telah mengalami perkembangan yang cukup baik, terutama dalam aspek penggunaan internet di instansi pemerintahan serta penerapan teknologi pendukung lainnya.

Variabel Open Government mencerminkan tingkat transparansi serta ketersediaan data yang disediakan oleh pemerintah dalam bentuk digital, yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan akuntabilitas layanan publik. Dalam penelitian ini, indikator yang dianalisis mencakup open data, pusat data, keberadaan data center, layanan teknologi informasi, serta kejelasan informasi mengenai proses layanan. Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh indikator dalam kategori ini memperoleh skor rata-rata 3,7 hingga 3,8, yang menempatkannya dalam rentang 61% - 80%, sehingga masuk dalam kategori terintegrasi (Integrated).

Skor ini menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya dalam menyediakan akses informasi yang lebih terbuka bagi masyarakat melalui sistem digital, memungkinkan pengguna layanan untuk memperoleh data dengan lebih mudah, cepat, dan transparan. Dengan adanya keterbukaan data ini, masyarakat dapat lebih memahami bagaimana proses layanan publik dijalankan serta memiliki akses terhadap berbagai informasi penting terkait kebijakan dan prosedur pemerintahan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tingkat penerapan Smart Government di Kabupaten Sumedang menurut Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara keseluruhan telah mencapai kategori 61% - 80%, atau yang dapat dikategorikan sebagai Integrated. Dengan skor akhir sebesar 3,9, hal ini menunjukkan bahwa implementasi pemerintahan berbasis teknologi di Kabupaten Sumedang telah berjalan dengan cukup baik dan mengalami perkembangan yang signifikan dalam berbagai aspek.

Meskipun demikian, jika ditinjau dari masing-masing variabel yang dianalisis, terdapat perbedaan skor pada setiap indikator, di mana variabel Infrastructure memperoleh skor paling rendah dibandingkan variabel lainnya. Menurut hasil yang diperoleh dari OPD, salah satu tantangan utama dalam pengembangan infrastruktur teknologi di Kabupaten Sumedang adalah masih adanya kekurangan dalam hal sensor dan cakupan teknologi pemantauan. Sensor memiliki peran krusial dalam mendukung berbagai aspek layanan digital, seperti sistem pemantauan lalu lintas, manajemen lingkungan, serta pengawasan keamanan dan layanan publik lainnya.

Sedangkan tingkat penerapan *Smart Government* di Kabupaten Sumedang menurut masyarakat telah mencapai kategori 61% - 80%, atau yang dikategorikan sebagai Integrated. Dengan skor akhir sebesar 3,7, hasil ini menunjukkan bahwa secara umum masyarakat menilai implementasi pemerintahan berbasis teknologi di Kabupaten Sumedang telah berjalan cukup baik dan mulai terintegrasi dalam berbagai aspek layanan publik. Namun, ketika dilihat lebih dalam berdasarkan variabel yang dianalisis, terdapat perbedaan skor pada masing-masing aspek, di mana variabel Infrastructure memperoleh skor yang paling rendah dibandingkan variabel lainnya. Salah satu indikator dalam variabel ini yang memiliki skor paling kecil adalah cakupan sensor, dengan nilai 3,4, yang mengindikasikan bahwa masyarakat masih merasakan adanya keterbatasan dalam penerapan sensor untuk mendukung layanan berbasis teknologi di Kabupaten Sumedang.

Ucapan Terimakasih

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada orang-orang yang penulis cintai dan hormati karena adanya dukungan motivasi, do'a dan yang sudah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung. Yang paling utama penulis ucapkan terimakasih kepada keluarga penulis yang cintai yaitu kedua orang tua penulis serta dukungan keluarga lainnya.

Daftar Pustaka

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, 53 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 1689 (2020).
- Abimanyu, M., Prawiradipura, H. J., Banuara, S., Kahfi, I. H., Artika, Y., & Dimas, G. (2023). *Buku 2 Masterplan Transformasi Digital Sumedang ver Final 280920*.
- Afandi, S. A. (2024). *Open Government : Studi Kasus di Cotabato Selatan*. 486–497.
- Agustian, I., Saputra, H. E., & Imanda, A. (2019). Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Di Pt. Jasaraharja Putra Cabang Bengkulu. *Profesional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 6(1), 42–60. <https://doi.org/10.37676/profesional.v6i1.837>
- Akadun, A. (2023). Sosialisasi WA KEPO Di Desa Cikole Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sebelas April*.

- Alfansyur, A., & Mariyani. (2020). Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik , Sumber Dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial. *Historis*, 5(2), 146–150.
- Ami, A., Idah, W., & Wibowo, T. H. (2021). Penerapan Digital Government di Desa Sukajaya Kabupaten Sumedang Jawa Barat. *Journal GEEJ*, 3(2), 147–158.
- Bahtera, P. T., & Jaya, A. (2024). *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah*. 6, 5490–5500. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i7.3020>
- Barsei, A. N., Nugroho, S. A., Ghassani, G. A., & Trianita, L. N. (2023). Inovasi Digital pada Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam Mendorong Open Government. *Matra Pembaruan*, 7(2), 99–110. <https://doi.org/10.21787/mp.7.2.2023.99-110>
- Bloom, N., & Reenen, J. Van. (2013). The Responsive City. In *NBER Working Papers*. <http://www.nber.org/papers/w16019>
- Cahyana, A. (2023). Akselerasi Pembangunan E-Government di Daerah: Analisis Praktik Baik Pemerintah Kabupaten Sumedang. *Jurnal Dialektika Politik*, 7(2), 139–169. www.sumedang.go.id,
- Cibro. (2021). *SMART GOVERNANCE : STRATEGI PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM MENUJU SUBULUSSALAM SMART CITY*.
- Cindi, U., & Altjie, T. (2017). *{engaruh Stres, Motivasi dan Kepuasan Kinerja Terhadap Kinerja Pegawai : Studi Pada Pegawai Non Medis di RS Bhayangkara Manado*. 369–378.
- Effendy, Z., & Subowo, A. (2018). Evaluasi Pelaksanaan E-Government di Kota Semarang. *EJurnal Undip*, 1(1), 1–15. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/viewFile/22675/20742>
- Fadhilurrahman, R., Saputra, M. C., & Herlambang, A. D. (2018). Evaluasi Penerapan E-government Di Pemerintah Kota Batu Menggunakan Kerangka Kerja Pemingkatan E-government Indonesia (PeGI). *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer (J-PTIIK) Universitas Brawijaya*, 2(12), 5977–5982.
- Fatmasari, F., Yuliangsih, E., Panjaitan, F., & Silvana, D. (2022). Evaluasi Implementasi E-Government Menggunakan Metode Pemingkatan E-Government Indonesia (PEGI). *Journal of Information Technology Ampera*, 3(2), 267–276. <https://journal-computing.org/index.php/journal-ita/article/view/304>
- Giffinger, R., Fertner, C., Kramar, H., & Meijers, E. (2007). City-ranking of European medium-sized cities. *Centre of Regional Science, Vienna UT, October*.
- Ginanjari, R., Supriadi, F., Junaedi, D. I., & Agustino, B. (2024). *Evaluasi Pengalaman Pengguna pada Aplikasi E-Office Desa di Kecamatan Cibugel Menggunakan User Experience Questionnaire*. 1–8.

- Hasanah, H. (2017). TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial). *At-Taqaddum*, 8(1), 21. <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>
- Herlambang, A. D., Putra, W. H. N., & Saputra, M. C. (2018). Evaluasi Kesiapan Implementasi Program Smart City Di Smart City Di Pemerintah Kabupaten Malang Dengan Menggunakan E Readiness. *Tecnoscienza*, 2(2), 1–19.
- I Setiawan, & Dkk. (2022). Penerapan Konsep Smart City Dalam Tata Kelola Pemerintahan Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 14(1), 97–116.
- Imtiyas, S. (2023). *Evaluasi tingkat maturitas smart governance di Kota Surakarta*. 18. <https://doi.org/10.20961/region.v18i2.62946>.
- Pamungkas MR, Indratno I. Persepsi Masyarakat Berbasis Neurosains di Desa Wisata Rawabogo. *Jurnal Riset Perencanaan Wilayah dan Kota*. 2021 Oct 24;1(1):38–46.
- Yuniar N, Indratno I. Pengukuran Motivasi Masyarakat terhadap Keberlangsungan Ekologi di Desa Wisata Rawabogo Berbasis Neurosains. *Jurnal Riset Perencanaan Wilayah dan Kota*. 2022 Dec 20;91–100.
- Virgi Fathurrahman, Ina Helena Agustina, Riswandha Risang Aji. Partisipasi Masyarakat Desa Jagara dalam Pengembangan Objek Wisata Waduk Darma Kabupaten Kuningan. *Jurnal Riset Perencanaan Wilayah dan Kota (JRPWK)*. 2024;4(1).
- Pambudi HDA, Kurniasari N. Pengaruh Politik Pembangunan terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Riset Perencanaan Wilayah dan Kota*. 2021 Dec 23;1(2):107–14.